

**ANALISIS PENGGUNAAN RATIO : KEMANDIRIAN,
EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN
SEBAGAI ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
PADA PEMDA DKI JAKARTA**

M. Agung Satryo Utomo
Universitas Nasional
agung@mass.co.id

ABSTRACT: *Regional capabilities in financial management outlined in the budget that directly or indirectly reflects the ability of local governments to finance the implementation of the duties of government, community development and social services. The evaluation of the financial management of local and regional financial financing will largely determine the position of a local authority in order to implement regional autonomy. This study aims to analyze the financial performance of local government DKI Jakarta views of Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Activity Ratios And Growth Ratio, in fiscal year 2008-2011. The results were obtained ratio of local financial independence of Jakarta's local government in 2008-2011 can be categorized patterns participative relationships with a range of interval 50-75%. PAD Effectiveness Ratio fiscal year 2008 to 2011, respectively amounted to 100.71%, 102.29%, 104.68% and 109.49%. Effectiveness Assessment Criteria according Kepmendagri No.690.900-327, 1996, the financial performance of Jakarta is very effective. Efficiency Ratio shopping areas to the regional income in accordance with the Local Government Capital Regional Financial Efficiency Assessment Criteria on page 45 of the Regional Financial Efficiency Assessment Criteria. In fiscal year 2008 financial performance of Jakarta is quite efficient. In the 2009 fiscal year level of efficiency is inefficient because it is in the interval > 100. In fiscal year 2010 and 2011 the level of efficiency of performance keuanagn Jakarta is in the interval > 90-100 means that the criterion is less efficient.*

Keywords: *Financial Performance Government, Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Activity Ratios, Growth Ratio*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Jusmawati 2011: 14).

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Analisis kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

Peneliti memilih pemda DKI Jakarta sebagai obyek penelitian. Pemda ini menjadi menarik dibahas karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta mengenai penggunaan APBD 2011 yang bermasalah sebesar Rp 4,82 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp 2,44 miliar, dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 7,02 miliar. Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan (PPATK) mendapat temuan transaksi fiktif yang dilakukan pemda DKI Jakarta. Dengan memberikan pernyataan praduga bahwa pemda DKI Jakarta adalah paling terkorup di antara pemda lainnya (Sumber : detik.com).

Pemerintah daerah DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan Dan Kemampuan Anggaran Keuangan Daerah (Sumber : Wikipedia Indonesia). Dalam hal anggaran pemda DKI pada tahun anggaran 2012 memperoleh anggaran sebesar Rp 41 triliun.

Dengan anggaran sebesar ini kemampuan kinerja keuangan pemda Jakarta dipertanyakan. Terutama dengan temuan BPK dan PPATK mencoreng pengelolaan keuangan pemda Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 1) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah daerah DKI Jakarta dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi , Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan, pada tahun anggaran 2008-2011 ? 2) Apakah kinerja pemerintah provinsi mengalami fluktuatif pada tahun anggaran 2008-2011 ?

REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS

Pengertian analisis kinerja keuangan menurut Abdul Halim (2007:231) adalah: Usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah .
- d. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
- e. Mengukur bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai saran masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau pun membeli obligasi.

Menurut Abdul Halim (2007 : 232) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah diuraikan berikut ini :

- a) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah (Abdul Halim, 2007 : 232).

- b) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2007 : 234).

c) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2007 : 234) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Menurut Abdul Halim (2007:234).

d) Rasio aktifitas

Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Abdul Halim, 2007 : 235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

e) Rasio pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Abdul Halim, 2001 : 272). Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Studi Empiris

Study empiris merupakan study kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman study-study terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu :

I Dewa Gede Bisma (2008) meneliti tentang "EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2003-2007". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa

rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kinerja keuangan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2003-2007 masih tidak optimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan ketergantungan daerah sangat tinggi untuk desentralisasi fiskal cukup. dan Untuk efektifitas sangat efektif sedangkan efisiensi tidak efisien.

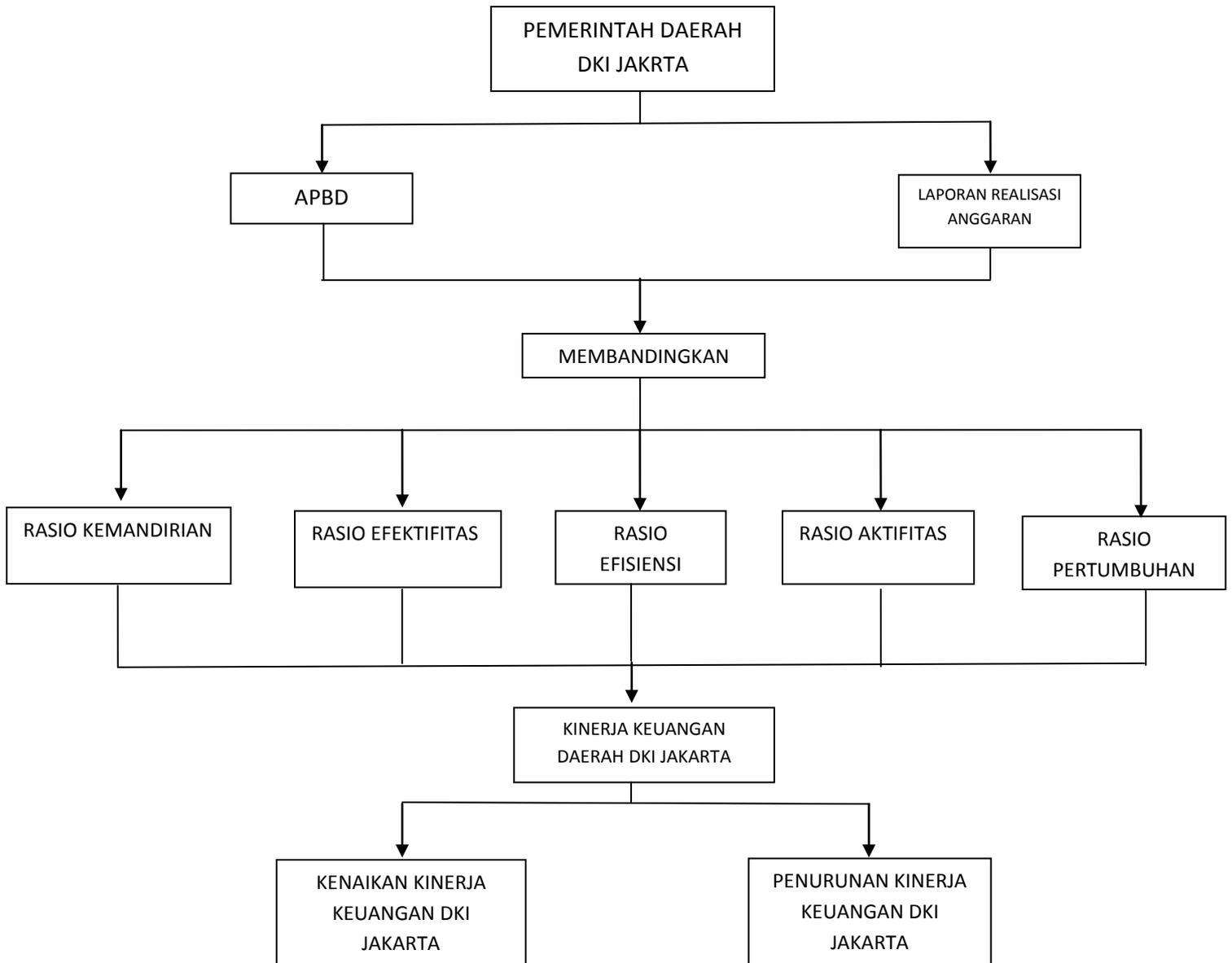
Andreas Ronald dan dwi sarmiyatiningsih (2009) "**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO**". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa analisis seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum otonomi daerah cenderung menurun akan tetapi perekonomian tidak tumbuh. Hal ini dimungkinkan penelitian ini tidak mengidentifikasi penyebab varian dalam analisis efisiensi belanja.

Nanik Wahyuni (2007) meneliti tentang "**ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG**". Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat analisis seperti Rasio kemandirian, Rasio efektifitas, Rasio Aktifitas Rasio Pengelolaan Belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten di malang rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%. Defisiit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin.

Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Kerangka Analisis

Gambar 1



Sumber : diolah Penulis

Keterangan :

: Objek Yang Menjadi Fokus Analisis

\longrightarrow : Menunjukkan Hubungan Fungsional

Keterangan :

Keterangan Bagan Kerangka Analisis :

- a. Objek Penelitian Penulis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 dan 2011.
- b. Penulis akan meneliti bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi DKI objek Penelitian melalui dokumen-dokumen resmi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari data mengenai Laporan Keuangan Pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, yang ada relevansinya dengan judul dan pembahasan skripsi serta data yang berdasarkan dari rasio keuangan .

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen, catatan-catatan, serta artikel-artikel yang diperoleh dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini melalui kegiatan riset, khususnya mengenai Laporan Keuangan Pemerintah dalam bentuk Realisasi Anggaran **Rasio Kemandirian**

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : A.A.N.B. Dwirandra (Abdul Halim 2001 : 168)

Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Abdul Halim (2001 : 168) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah antara lain :

- (1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- (3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah persen	Kriteria
≥ 100	Sangat efektif
>90 - 100	Efektif
>80 - 90	Cukup efektif
>60 - 80	Kurang efektif
≤ 60	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah persen	Kriteria
≥ 100	Tidak efisien
>90 - 100	Kurang efisien
>80 - 90	Cukup efisien
>60 - 80	Efisien
≤ 60	Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

Rasio aktivitas

1) Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

2) Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Pertumbuhan

Menghitung rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung:

1) Persentase Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{PAD Tahun P} - \text{PAD Tahun P-1}}{\text{PAD Tahun P-1}} \times 100\%$$

2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan Tahun P} - \text{Pendapatan Tahun P -1}}{\text{Pendapatan Tahun P -1}} \times 100\%$$

3) Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah/ Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Belanja Rutin P} - \text{Belanja Rutin P-1}}{\text{Belanja Rutin P-1}} \times 100\%$$

4) Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan/ Belanja Modal

$$= \frac{\text{Blj Pemb Tahun P} - \text{Blj Pemb Tahun P-1}}{\text{Belanja Pembangunan Tahun P-1}} \times 100\%$$

KETERANGAN

P = TAHUN KE 2

P-1= TAHUN AWAL

Blj = belanja

HASIL DAN PEMBAHASAN

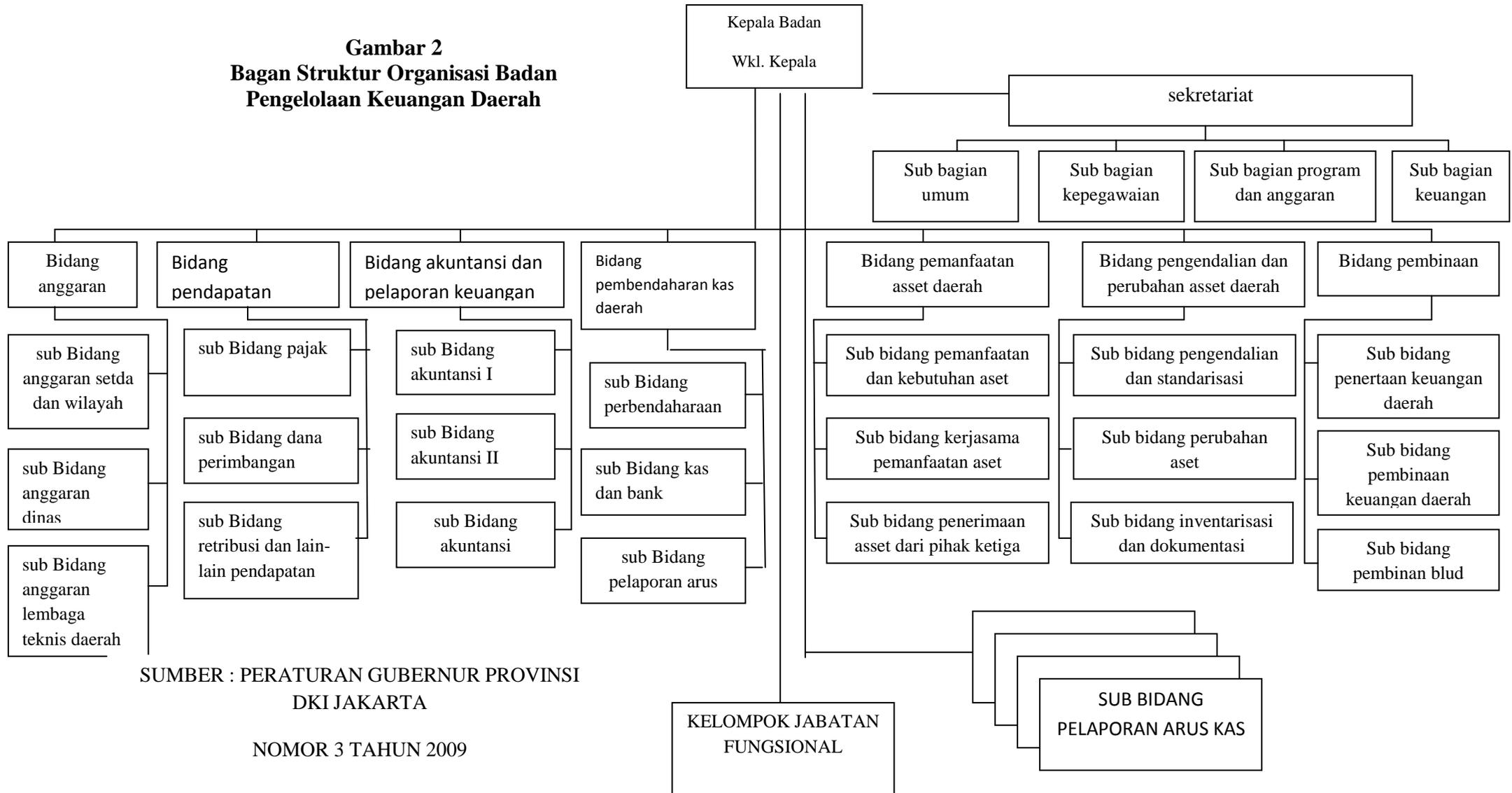
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 juli 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan provinsi DKI Jakarta adalah khusus yang berfungsi sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sekaligum Sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7(tujuh) meter diatas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari daratan seluas 661,51 km² termasuk 110 pulau di kepulauan seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu

Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Sealatan, Jakarta Timur dan Administratif kepulauan seribu. Disebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari barat sampai Timur sepanjang \pm 35 km, yang bermuara 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta disebelah utara laut Jawa, sebelah timur kota bekasi Provinsi jawa barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Pemerintah DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakan pada tingkat Provinsi, adapun penyelenggara pemerintahnya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentralisasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 32 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah



SUMBER : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
 DKI JAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2009

a. Rasio Kemandirian

Berikut adalah perhitungan rasio kemandirian yang datanya bersumber dari laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2008 sampai tahun anggran 2011.

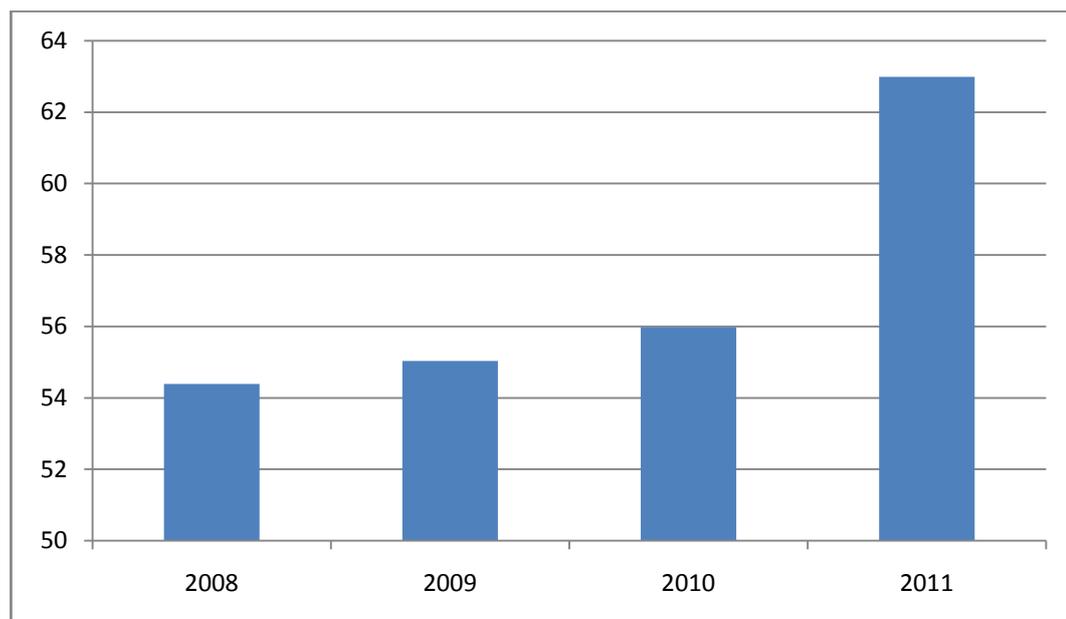
Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011

Jenis	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Realisasi 2011
Pendapatan Asli Daerah (1)	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82
Pajak Daerah	8.751.273.782.037,00	8.560.134.926.182,00	10.751.745.151.388,10	15.221.249.152.689,46
Retribusi Daerah	395.639.567.901,00	416.896.030.531,45	439.210.908.273,00	609.349.051.004,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	163.151.310.356,00	181.130.584.183,00	223.005.615.402,00	278.789.767.934,40
Lain-lain PAD	1.145.500.880.462,03	1.442.896.417.886,83	1.478.030.506.977,95	1.716.599.322.802,96
Dana transfer (2)	8.702.813.393.647,00	8.650.835.929.772,00	10.133.994.811.087,00	10.462.963.410.649,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah (3)	63.378.946.200,00	10.787.700.000,00	0,00	8.410.777.790,00
Jumlah pendapatan (4)	19.221.757.880.603,03	19.262.681.588.555,30	23.025.986.993.128,05	28.297.361.482.869,82
Rasio kemandirian (5)				
(1):(4)=5	54,39%	55,03%	55,98%	62,99%
Rata-rata rasio			57,097%	

Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

Tahun 2008 =	$\frac{10.455.565.540.756,03}{19.221.757.880.603,03}$	= 54,39%
Tahun 2009 =	$\frac{10.601.057.958.783,30}{19.262.681.588.555,30}$	= 55,03%
Tahun 2010 =	$\frac{12.891.992.182.041,05}{23.025.986.993.128,05}$	= 55,98%
Tahun 2011 =	$\frac{17.825.981.741.430,82}{28.297.361.482.869,82}$	= 62,99%

Bagan 1 Rasio Kemandirian



Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 2008-2011 adalah sebesar 54,39%, 55,03%, 55,98%, dan 62,99%. Sesuai dengan Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah dapat dikategorikan pada tahun anggaran 2008-2011 pemerintah daerah memiliki pola hubungan partisipatif dikarenakan ada di kisaran interval 50 - 75 % . dimana kemampuan daerah adalah sedang. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Abdul Halim (2001 : 168) pola partisipatif adalah dalam pemerintah daerah DKI Jakarta peranan pemerintah pusat mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Perlu dicermati bahwa pola Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah tidak ada yang mencapai interval 100% dikarenakan

masih adanya campurtangan dari pemerintah pusat yang cukup besar pada pemerintah DKI Jakarta. Ada baiknya pemerintah DKI Jakarta kinerja keuangan pemerintah DKI Jakarta di perbaiki

Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari rasio kemandiri

Trend rasio kemandirian kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 0,64%, 0,95%, 7,01%.. Dari tahun ke tahun kenaikan pendapatan disebabkan kenaikan dana transfer diikuti pula pada pendapatan asli daerah tahun awal periode penelitian kinerja keuangan daerah mengalami penurunan yang disebabkan PAD yang berkurang dan pajak daerah tetapi pada item retribusi, hasil kekayaan, dan lain-lain PAD mengalami kenaikan walupun tidak signifikan dapat mempengaruhi rasio kemandirian. Secara keseluruhan rasio kemandirian pada tahun anggaran 2008-2011 tidak ada pencapaian yang melebihi 100%.

b. Ratio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011

Jenis	Anggaran 2008	Anggaran 2009	Anggaran 2010	Anggaran 2011
▪ Pajak Daerah	8.484.270.000.000,00	8.615.000.000.000,00	10.083.000.000.000,00	13.965.000.000.000,00
▪ Retribusi Daerah	363.568.236.100,00	384.640.000.000,00	407.910.000.000,00	456.248.032.680,00
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.976.913.465,00	180.000.000.000,00	212.840.000.000,00	243.677.628.025,00
▪ Lain-lain PAD	1.362.727.669.796,00	1.183.795.508.395,00	1.611.648.272.250,00	1.615.207.996.665,00
Jumlah PAD	10.381.542.819.361,00	10.363.435.508.395,00	12.315.398.272.250,00	16.280.133.657.370,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011

Jenis	realisasi 2008	realisasi 2009	realisasi 2010	Realisasi 2011
▪ Pajak Daerah	8.751.273.782.037,00	8.560.134.926.182,00	10.751.745.151.388,10	15.221.249.152.689,46
▪ Retribusi Daerah	395.639.567.901,00	416.896.030.531,45	439.210.908.273,00	609.349.051.004,00
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	163.151.310.356,00	181.130.584.183,00	223.005.615.402,00	278.789.767.934,40
▪ Lain-lain PAD	1.145.500.880.462,03	1.442.896.417.886,83	1.478.030.506.977,95	1.716.599.322.802,96
Jumlah PAD	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82

Table 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektifitas %
2008	10.455.565.540.756,03	10.381.542.819.361,00	100,71%
2009	10.601.057.958.783,30	10.363.435.508.395,00	102,29%
2010	12.891.992.182.041,05	12.315.398.272.250,00	104,68%
2011	17.825.981.741.430,82	16.280.133.657.370,00	109,49%
Rata-rata Rasio efektifitas tahun 2007-2011			104,292%

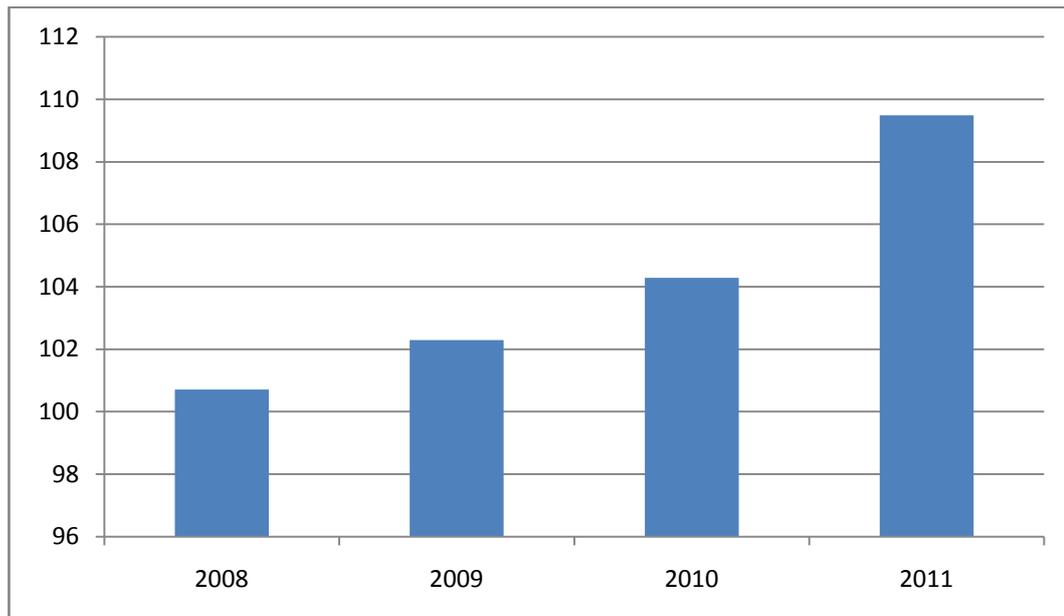
Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

$$\text{Tahun 2008} = \frac{10.455.565.540.756,00}{10.381.542.819.361,00} = 100,71\%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{10.601.057.958.783,30}{10.363.435.508.395,00} = 102,29\%$$

Tahun 2010 =	$\frac{12.891.992.182.041,05}{12.315.398.272.250,00}$	= 104,68%
Tahun 2011 =	$\frac{17.825.981.741.430,80}{16.280.133.657.370,00}$	= 109,49%

Bagan 2 Rasio Efektivitas



Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebesar 100,71%, 102,29%, 104,68%, dan 109,49%. Sesuai Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah halaman 44 . kinerja keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya efektifitas keuangan daerah melewati 100%. Menurut criteria Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah sangat efektif.

Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari Rasio efektivitas PAD

Trend rasio efektivitas kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%. Kenaikan PAD dipengaruhi dari sisi Peningkatan realisasi penerimaan PAD dari tahun anggaran 2008-2011 dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal seperti; peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut maupun

c. Rasio Efisiensi

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011

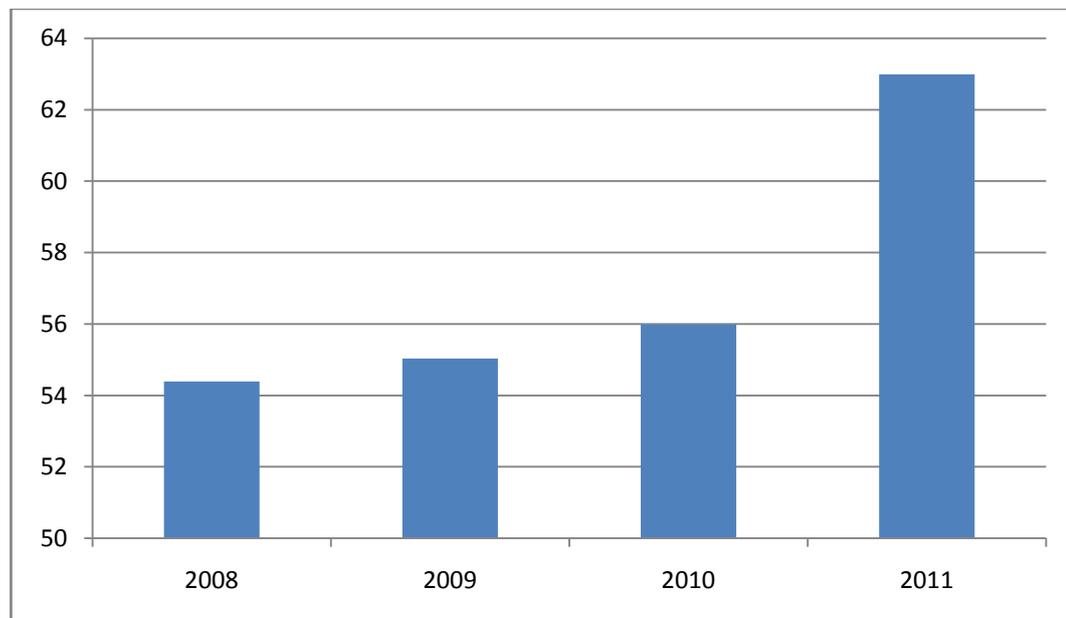
	Jenis pendapatan	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Realisasi 2011
	▪ Pendapatan Asli Daerah	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82
	▪ Dana Perimbangan	8.702.813.393.647,00	8.650.835.929.772,00	10.133.994.811.087,00	10.462.963.410.649,00
	▪ Lain-lain Pendapatan Yang Sah	63.378.946.200,00	10.787.700.000,00	0,00	8.410.777.790,00
	Jumlah pendapatan (1)	19.221.757.880.603,03	19.262.681.588.555,30	23.025.986.993.128,05	28.297.361.482.869,82
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	13.371.844.499.614,00	14.694.496.595.930,10	16.309.749.142.137,00	19.107.266.558.546,00
1	Belanja Pegawai	7.594.314.386.260,00	7.547.422.794.478,00	8.537.848.251.424,00	9.895.560.039.177,00
2	Belanja Barang	5.255.670.594.905,00	6.773.237.463.833,06	7.312.154.901.037,00	8.341.831.218.443,00
3	Belanja Bunga	14.998.359.777,00	9.943.209.211,00	7.421.194.046,00	4.353.524.981,00
4	Belanja Hibah	177.020.390.700,00	305.274.309.265,00	423.468.762.400,00	825.595.987.217,00
5	Belanja Bantuan Sosial	329.840.767.972,00	58.020.461.866,00	27.517.450.000,00	38.587.205.558,00
6	Belanja Bantuan Keuangan		598.357.277,00	1.338.583.230,00	1.338.583.170,00
II	Belanja Modal	2.581.600.192.153,00	4.816.602.834	5.243.146.696.798	7.316.333.334.751,00 33

			.892,00	,00	
1	Belanja Tanah	310.014.250.971,00	1.574.898.884.529,00	789.628.585.455,00	836.875.205.034,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	536.988.391.766,00	1.151.718.217.654,00	1.814.555.325.146,00	2.230.836.678.548,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.143.144.239.492,00	1.406.444.458.495,00	1.272.971.144.201,00	2.178.504.183.603,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	534.834.223.137,00	565.449.291.331,00	1.162.459.219.136,00	1.661.022.855.743,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	56.619.086.787,00	118.091.982.883,00	203.532.422.860,00	409.094.411.823,00
III	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
Jml	Jumlah belanja (2)	15.953.444.691.767,00	19.511.099.430.822,10	21.552.895.838.935,00	26.423.599.893.297,00
	Rasio efisiensi (3) (2) : (1)= (3)	82,99%	101,28%	93,60%	93,37%

Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

Tahun 2008 =	$\frac{10.455.565.540.756,03}{19.221.757.880.603,03}$	= 54,39%
Tahun 2009 =	$\frac{10.601.057.958.783,30}{19.262.681.588.555,30}$	= 55,03%
Tahun 2010 =	$\frac{12.891.992.182.041,05}{23.025.986.993.128,05}$	= 55,98%
Tahun 2011 =	$\frac{17.825.981.741.430,82}{28.297.361.482.869,82}$	= 62,99%

Bagan 1 Rasio Kemandirian



Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 2008-2011 adalah sebesar 54,39%, 55,03%, 55,98%, dan 62,99%. Sesuai dengan Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah dapat dikategorikan pada tahun anggaran 2008-2011 pemerintah daerah memiliki pola hubungan partisipatif dikarenakan ada di kisaran interval 50 - 75 % . dimana kemampuan daerah adalah sedang. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Abdul Halim (2001 : 168) pola partisipatif adalah dalam pemerintah daerah DKI Jakarta peranan pemerintah pusat mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Perlu dicermati bahwa pola Pola Hubungan dan Tingkat

masih adanya campurtangan dari pemerintah pusat yang cukup besar pada pemerintah DKI Jakarta. Ada baiknya pemerintah DKI Jakarta kinerja keuangan pemerintah DKI Jakarta di perbaiki

Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari rasio kemandiri

Trend rasio kemandirian kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 0,64%, 0,95%, 7,01%.. Dari tahun ke tahun kenaikan pendapatan disebabkan kenaikan dana transfer diikuti pula pada pendapatan asli daerah tahun awal periode penelitian kinerja keuangan daerah mengalami penurunan yang disebabkan PAD yang berkurang dan pajak daerah tetapi pada item retribusi, hasil kekayaan, dan lain-lain PAD mengalami kenaikan walupun tidak signifikan dapat mempengaruhi rasio kemandirian. Secara keseluruhan rasio kemandirian pada tahun anggaran 2008-2011 tidak ada pencapaian yang melebihi 100%.

d. Ratio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011

Jenis	Anggaran 2008	Anggaran 2009	Anggaran 2010	Anggaran 2011
▪ Pajak Daerah	8.484.270.000.000,00	8.615.000.000.000,00	10.083.000.000.000,00	13.965.000.000.000,00
▪ Retribusi Daerah	363.568.236.100,00	384.640.000.000,00	407.910.000.000,00	456.248.032.680,00
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.976.913.465,00	180.000.000.000,00	212.840.000.000,00	243.677.628.025,00
▪ Lain-lain PAD	1.362.727.669.796,00	1.183.795.508.395,00	1.611.648.272.250,00	1.615.207.996.665,00
Jumlah PAD	10.381.542.819.361,00	10.363.435.508.395,00	12.315.398.272.250,00	16.280.133.657.370,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011

Jenis	realisasi 2008	realisasi 2009	realisasi 2010	Realisasi 2011
▪ Pajak Daerah	8.751.273.782.037,00	8.560.134.926.182,00	10.751.745.151.388,10	15.221.249.152.689,46

▪ Retribusi Daerah	395.639.567.901,00	416.896.030.531,45	439.210.908.273,00	609.349.051.004,00
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	163.151.310.356,00	181.130.584.183,00	223.005.615.402,00	278.789.767.934,40
▪ Lain-lain PAD	1.145.500.880.462,03	1.442.896.417.886,83	1.478.030.506.977,95	1.716.599.322.802,96
Jumlah PAD	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82

Table 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektifitas %
2008	10.455.565.540.756,03	10.381.542.819.361,00	100,71%
2009	10.601.057.958.783,30	10.363.435.508.395,00	102,29%
2010	12.891.992.182.041,05	12.315.398.272.250,00	104,68%
2011	17.825.981.741.430,82	16.280.133.657.370,00	109,49%
Rata-rata Rasio efektivitas tahun 2007-2011			104,292%

Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

$$\text{Tahun 2008} = \frac{10.455.565.540.756,00}{10.381.542.819.361,00} = 100,71\%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{10.601.057.958.783,30}{10.363.435.508.395,00} = 102,29\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{12.891.992.182.041,05}{12.315.398.272.250,00} = 104,68\%$$

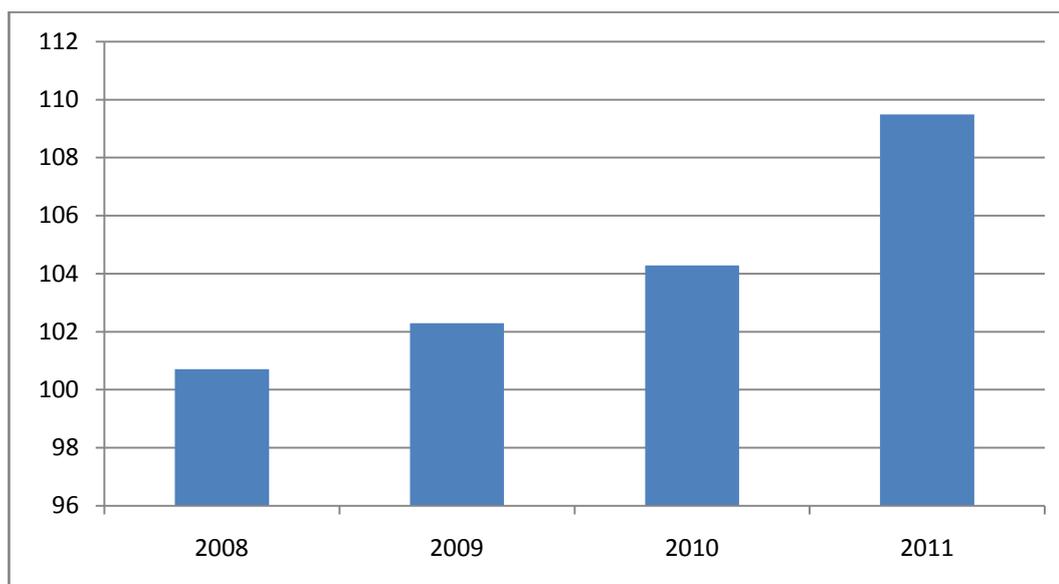
$$= 109,49\%$$

Tahun 2011 = $\frac{17.825.981.741.430,80}{16.280.133.657.370,00}$

Jenis pendapatan	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Realisasi 2011

16.280.133.657.370,00

Bagan 2 Rasio Efektivitas



Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebesar 100,71%, 102,29%, 104,68%, dan 109,49%. Sesuai Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah halaman 44 . kinerja keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya efektifitas keuangan daerah melewati 100%. Menurut criteria Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah sangat efektif.

Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari Rasio efektivitas PAD

Trend rasio efektivitas kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%. Kenaikan PAD dipengaruhi dari sisi Peningkatan realisasi penerimaan PAD dari tahun anggaran 2008-2011 dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal seperti; peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut maupun masyarakat serta peningkatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.

	▪ Pendapatan Asli Daerah	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82
	▪ Dana Perimbangan	8.702.813.393.647,00	8.650.835.929.772,00	10.133.994.811.087,00	10.462.963.410.649,00
	▪ Lain-lain Pendapatan Yang Sah	63.378.946.200,00	10.787.700.000,00	0,00	8.410.777.790,00
	Jumlah pendapatan (1)	19.221.757.880.603,03	19.262.681.588.555,30	23.025.986.993.128,05	28.297.361.482.869,82
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	13.371.844.499.614,00	14.694.496.595.930,10	16.309.749.142.137,00	19.107.266.558.546,00
1	Belanja Pegawai	7.594.314.386.260,00	7.547.422.794.478,00	8.537.848.251.424,00	9.895.560.039.177,00
2	Belanja Barang	5.255.670.594.905,00	6.773.237.463.833,06	7.312.154.901.037,00	8.341.831.218.443,00
3	Belanja Bunga	14.998.359.777,00	9.943.209.211,00	7.421.194.046,00	4.353.524.981,00
4	Belanja Hibah	177.020.390.700,00	305.274.309.265,00	423.468.762.400,00	825.595.987.217,00
5	Belanja Bantuan Sosial	329.840.767.972,00	58.020.461.866,00	27.517.450.000,00	38.587.205.558,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	-	598.357.277,00	1.338.583.230,00	1.338.583.170,00
II	Belanja	2.581.600.19	4.816.602.834	5.243.146.696.798	7.316.333.334.751,00

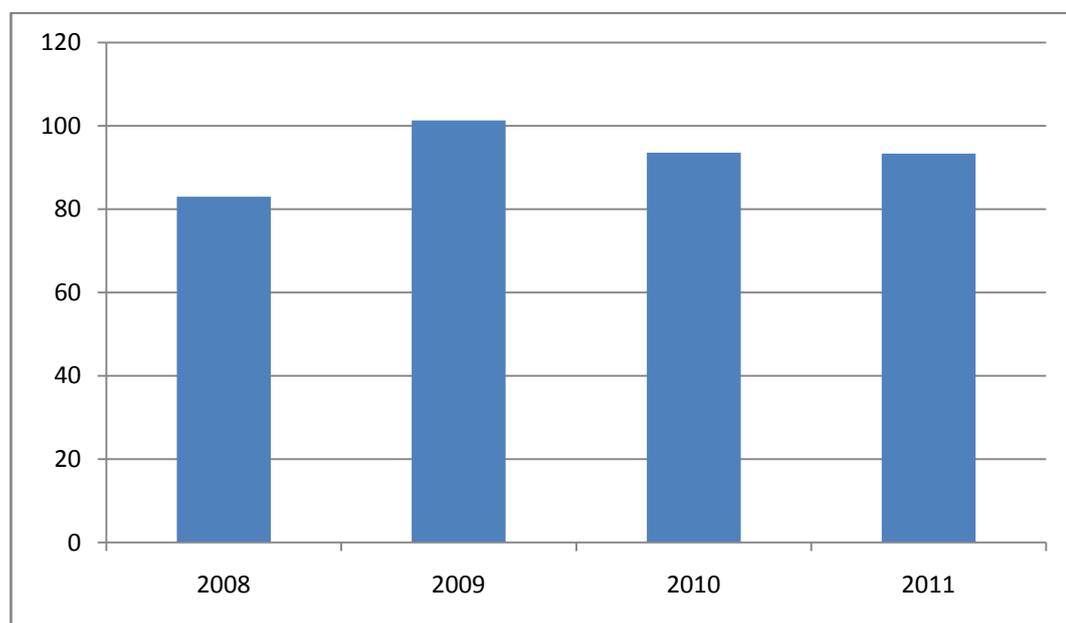
	Modal	2.153,00	.892,00	,00	
1	Belanja Tanah	310.014.250.971,00	1.574.898.884.529,00	789.628.585.455,00	836.875.205.034,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	536.988.391.766,00	1.151.718.217.654,00	1.814.555.325.146,00	2.230.836.678.548,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.143.144.239.492,00	1.406.444.458.495,00	1.272.971.144.201,00	2.178.504.183.603,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	534.834.223.137,00	565.449.291.331,00	1.162.459.219.136,00	1.661.022.855.743,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	56.619.086.787,00	118.091.982.883,00	203.532.422.860,00	409.094.411.823,00
III	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
Jml	Jumlah belanja (2)	15.953.444.691.767,00	19.511.099.430.822,10	21.552.895.838.935,00	26.423.599.893.297,00
	Rasio efisiensi (3) (2) : (1) = (3)	82,99%	101,28%	93,60%	93,37%

c. Rasio efisiensi

$$\text{Tahun 2009} = \frac{15.953.444.691.767,00}{19.221.757.880.603,03} = 82,99\%$$

Tahun 2009	=	$\frac{19.511.099.430.822,10}{19.262.681.588.555,30}$	=	101,28%
Tahun 2010	=	$\frac{21.552.895.838.935,00}{23.025.986.993.128,05}$	=	93,60%
Tahun 2011	=	$\frac{26.423.599.893.297,00}{28.297.361.482.869,82}$	=	93,37%

Bagan 4. 3 rasio efesiensi



Berdasarkan data diatas diketahui bahwa rasio efesiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun 2008 sampai 2011 adalah 82,99%, 101,28%, 93,60% dan 93,37% . sesuai dengan Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah pada halaman 45 tentang Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2008 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah cukup efisien. Pada

tahun anggaran 2009 tingkat efisiensi adalah tidak efisien karena berada pada interval ≥ 100 . Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 tingkat efisiensi kinerja keuangan DKI Jakarta adalah pada interval $>90 - 100$ berarti kriterianya adalah kurang efisien.

Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari Rasio efisiensi

Trend rasio efisiensi secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 18,29%, -7,68%, -0,23%. Berdasarkan tahun anggaran 2008-2009 tingkat efisiensi mengalami kenaikan yang berarti keefisienan keuangan DKI Jakarta mengalami penurunan dari cukup efisien ke tidak efisien. Butuh program yang konkret agar tingkat efisiensi dapat teratasi terutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja daerah. Agar kedepannya tingkat efisiensi dapat di kategorikan efisien.

Ketidakefisienan disebabkan pada belanja operasional yang dimana terlalu mempengaruhi terhadap pendapatan.

d. Rasio aktivitas

Berikut adalah perhitungan rasio aktivitas yang datanya bersumber dari laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2011.

**Tabel 4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap APBD Pemerintah Daerah DKI Jakarta
tahun anggaran 2007-2011**

	Jenis belanja	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Realisasi 2011
I	Belanja Operasi (1)	13.371.844.499.614,00	14.694.496.595.930,10	16.309.749.142.137,00	19.107.266.558.546,00
	Belanja Pegawai	7.594.314.386.260,00	7.547.422.794.478,00	8.537.848.251.424,00	9.895.560.039.177,00
	Belanja Barang	5.255.670.594.905,00	6.773.237.463.833,06	7.312.154.901.037,00	8.341.831.218.443,00
	Belanja Bunga	14.998.359.777,00	9.943.209.211,00	7.421.194.046,00	4.353.524.981,00
	Belanja Hibah	177.020.390.700,00	305.274.309.265,00	423.468.762.400,00	825.595.987.217,00
	Belanja Bantuan Sosial	329.840.767.972,00	58.020.461.866,00	27.517.450.000,00	38.587.205.558,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	598.357.277,00	1.338.583.230,00	1.338.583.170,00
II	Belanja Modal (2)	2.581.600.192.153,00	4.816.602.834.892,00	5.243.146.696.798,00	7.316.333.334.751,00
	Belanja Tanah	310.014.250.971,00	1.574.898.884.529,00	789.628.585.455,00	836.875.205.034,00
	Belanja Peralatan Dan Mesin	536.988.391.766,00	1.151.718.217.654,00	1.814.555.325.146,00	2.230.836.678.548,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.143.144.239.492,00	1.406.444.458.495,00	1.272.971.144.201,00	2.178.504.183.603,00

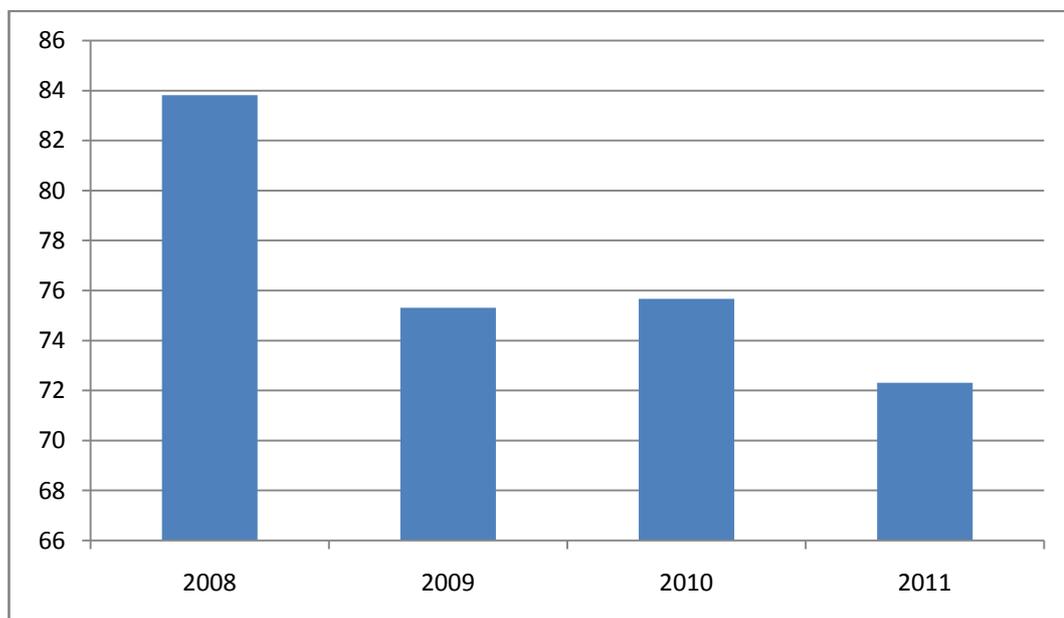
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	534.834.223.137,00	565.449.291.331,00	1.162.459.219.136,00	1.661.022.855.743,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	56.619.086.787,00	118.091.982.883,00	203.532.422.860,00	409.094.411.823,00
III	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tak Terduga	3.081.394.807,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah belanja (3)	15.953.444.691.767,00	19.511.099.430.822,10	21.552.895.838.935,00	26.423.599.893.297,00
(1):(3)	Rasio keserasian Belanja operasi	83,81%	75,31%	75,67%	72,31%
(2):(3)	Rasio keserasian Belanja modal	16,19%	24,69%	24,33%	27,69%
	Rata - Rata Rasio Belanja operasi	76,775%	Rata - Rata Rasio Belanja modal		23,225%

Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

Rasio keserasian Belanja operasi

Tahun 2008	=	$\frac{13.371.844.499.614,00}{15.953.444.691.767,00}$	=	83,81%
Tahun 2009	=	$\frac{14.694.496.595.930,10}{19.511.099.430.822,10}$	=	75,31%
Tahun 2010	=	$\frac{16.309.749.142.137,00}{21.552.895.838.935,00}$	=	75,67%
Tahun 2011	=	$\frac{19.107.266.558.546,00}{26.423.599.893.297,00}$	=	72,31%

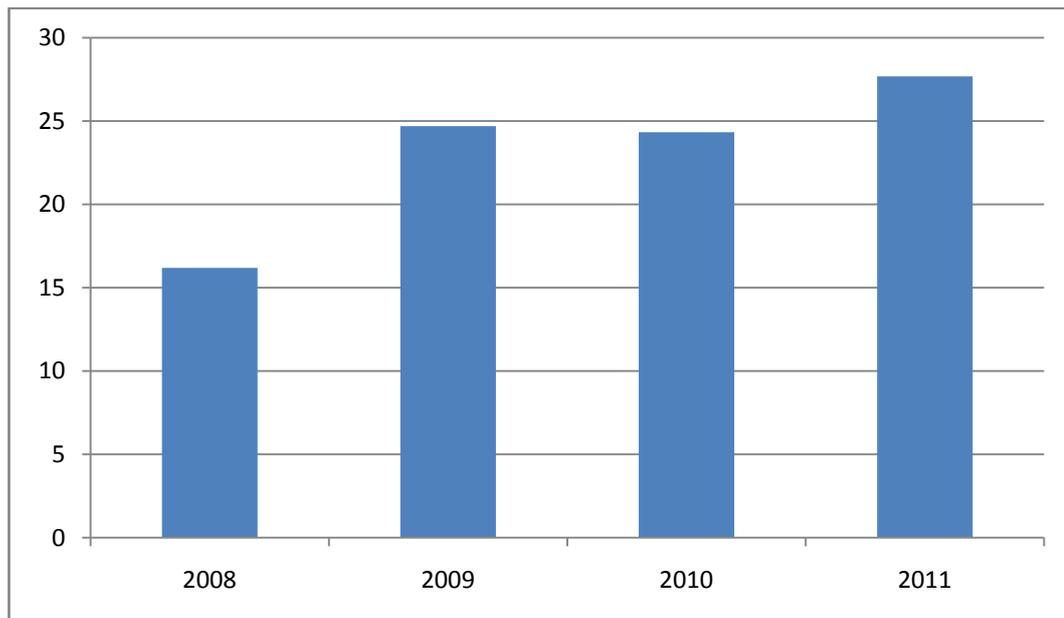
Bagan 4 rasio aktivitas belanja operasi



Rasio keserasian Belanja modal

Tahun 2008 =	$\frac{2.581.600.192.153,00}{15.953.444.691.767,00}$	= 16,19%
Tahun 2009 =	$\frac{4.816.602.834.892,00}{19.511.099.430.822,10}$	= 24,69%
Tahun 2010 =	$\frac{5.243.146.696.798,00}{21.552.895.838.935,00}$	= 24,33%
Tahun 2011 =	$\frac{7.316.333.334.751,00}{26.423.599.893.297,00}$	= 27,69%

Bagan 5 rasio aktivitas belanja modal



Dari perhitungan rasio aktifitas diatas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja modal sehingga rasio belanja operasi terhadap APBD masih sangat rendah. Ratio belanja operasi pada tahun 2008 belanja operasi sebesar 83,81% dan belanja modal sebesar 16,19%. pada tahun 2009 belanja operasi sebesar 75,31% dan belanja modal sebesar 24,69% pada tahun 2010 belanja operasi sebesar 75,67% dan belanja

modal sebesar 24,33% pada tahun 2011 belanja operasi sebesar 72,31% dan belanja modal sebesar 27,69%.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ratio aktifitas pemerintah daerah DKI Jakarta lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi dari pada belanja modal. Belanja pegawai/ personalia perlu ditekan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta guna dialokasikan untuk belanja modal/ pembangunan untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

e. Rasio Pertumbuhan

Tabel 5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011.

No.	Keterangan	2008	2009	2010	2011
1	Pendapatan Asli Daerah	10.455.565.540.756,03	10.601.057.958.783,30	12.891.992.182.041,05	17.825.987.294.430,82
2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		1,39%	21,61%	38,27%
3	pendapatan	19.221.757.880.603,03	19.262.681.588.555,30	23.025.986.993.128,05	28.297.361.482.869,82
4	Pertumbuhan Pendapatan		0,21%	19,53%	22,89%
5	Belanja Operasi	13.371.844.499.614,00	14.694.496.595.930,10	16.309.749.142.137,00	19.107.266.558.546,00
6	Pertumbuhan Belanja Operasi		9,89%	10,99%	17,15%
7	Belanja Modal	2.581.600.192.153,00	4.816.602.834.892,00	5.243.146.696.798,00	7.316.333.334.751,00
8	Pertumbuhan Belanja Modal		86,57%	8,85%	39,54%

Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)

1) Perhitungan Pertumbuhan PAD.

$$a) \frac{10.601.057.958.783,30 - 10.455.565.540.756,03}{10.455.565.540.756,03} = 1,39\%$$

$$b) \frac{12.891.992.182.041,05 - 10.601.057.958.783,30}{10.601.057.958.783,30} = 21,61\%$$

10.601.057.958.783,30

$$\text{c) } \frac{17.825.987.294.430,82 - 12.891.992.182.041,05}{12.891.992.182.041,05} = 38,27\%$$

2) **Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan.**

$$\text{a) } \frac{19.262.681.588.555,30 - 19.221.757.880.603,03}{19.221.757.880.603,03} = 0,21\%$$

$$\text{b) } \frac{23.025.986.993.128,05 - 19.262.681.588.555,30}{19.262.681.588.555,30} = 19,53\%$$

$$\text{c) } \frac{28.297.361.482.869,82 - 23.025.986.993.128,05}{23.025.986.993.128,05} = 22,89\%$$

3) **Perhitungan Pertumbuhan Belanja Operasi**

$$\text{a) } \frac{14.694.496.595.930,10 - 13.371.844.499.614,00}{13.371.844.499.614,00} = 9,89\%$$

$$\text{b) } \frac{16.309.749.142.137,00 - 14.694.496.595.930,10}{14.694.496.595.930,10} = 10,99\%$$

$$\text{c) } \frac{19.107.266.558.546,00 - 16.309.749.142.137,00}{16.309.749.142.137,00} = 17,15\%$$

4) **Perhitungan Pertumbuhan Belanja Modal.**

$$\text{a) } \frac{4.816.602.834.892,00 - 2.581.600.192.153,00}{2.581.600.192.153,00} = 86,57\%$$

$$\text{b) } \frac{5.243.146.696.798,00 - 4.816.602.834.892,00}{4.816.602.834.892,00} = 8,85\%$$

$$\text{c) } \frac{7.316.333.334.751,00 - 5.243.146.696.798,00}{5.243.146.696.798,00} = 39,54\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD DKI Jakarta pada tahun anggaran 2008-2011 menunjukan pertumbuhan positif. Terutama pertumbuhan pendapatan, ada kecendrungan PAD DKI Jakarta mengalami kenaikan yang disebabkan terutama adalah pada sector pajak daerah , retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

PAD juga mengalami pertumbuhan yang pling signifikan pada tahun 2011 sebesar 38,27% dan pada tahun 2009 pertumbuhan yang paling

terendah sebesar 1,39%. pertumbuhan tersebut disebabkan karena menurunnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah,.

Selain pendapatan, belanja pemerintah DKI Jakarta yang terdiri belanja operasi dan belanja modal juga mengalami pertumbuhan. belanja operasi pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 17,15% karena pada tahun 2010 semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil dan antuan keuangan serta belanja tidak disangka mengalami kenaikan akibatnya pertumbuhan belanja modal pada tahun 2009 turun, yang pada tahun 2009 pertumbuhannya sebesar 11,10% pada tahun 2010 sebesar 2,63%.

Dari analisis rasio pertumbuhan diatas kinerja pengelolaan keuangan DKI Jakarta baik karena pemerintah DKI Jakarta mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan PAD tahun 2009 lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2007, 2008. setidaknya pemerintah mampu mempertahankan Penerimaan PAD tahun 2010 dan PAD tetap mengalami pertumbuhan.

SARAN & SIMPULAN

Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah antara lain:

- a. Rasio Kemandirian keuangan daerah Pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 2008-2011 adalah sebesar 54,39%, 55,03%, 55,98%, dan 62,99%. Sesuai dengan Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah dapat dikategorikan pada tahun anggaran 2008-2011 pemerintah daerah memiliki pola hubungan partisipatif dikerenakan ada di kisaran interval 50 - 75 % .
- b. Trend Rasio Kemandirian secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%.
- c. Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebesar 100,71%, 102,29%, 104,68%, dan 109,49%. Sesuai Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah halaman 44 . kinerja keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya efektifitas keuangan daerah melewati 100%. Menurut criteria Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah sangat efektif.
- d. Trend Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%.
- e. Rasio Efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun 2008 sampai 2011 adalah 82,99%. 101,28%, 93,60% dan 93,37% . sesuai dengan Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah pada halaman 45 tentang Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2008 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah cukup efisien. Pada tahun anggaran 2009 tingkat efisiensi adalah tidak efisien karena berada pada interval ≥ 100 . Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 tingkat efisiensi kinerja keuangan DKI Jakarta adalah pada interval $>90 - 100$ berarti kriterianya adalah kurang efisien.

- f. Trend Rasio Efisiensi tahun anggaran 2008-2011 adalah sebesar 18,29%, -7,68%, -0,23%.
- g. Trend dari perhitungan aktivitas disebabkan program kerja yang mengalami kenaikan.
- h. Trend pertumbuhan dari setiap perhitungan meningkat.

Saran

Maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

- a. Ada baiknya pemerintah DKI Jakarta meningkatkan PAD. Dengan program kongret yang dimana dapat meningkatkan PAD. potensi PAD Jakarta sangatlah besar dibandingkan pada daerah otonomi lainnya.
- b. Meningkatkan sisi efisiensi dengan pengurangan belanja terutama belanja pegawai dan meningkatkan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- c. Pemerintah daerah DKI Jakarta ada baiknya memprioritaskan belanja modal dari pada belanja operasi. Belanja pegawai perlu ditekan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta guna dialokasikan untuk belanja modal untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.
Peningkatan pembangunan jangka panjang dalam serta peningkatan investor . bertujuan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta meliputi perluasan lapangan kerja. Serta peningkatan kualitas SDM pada masyarakat DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok, 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, Bandung.
- Abdullah, Syukriy, *Jurnal SNA: Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali*, 2003
- Afrizawati, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi: Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*, 2012
- Anggiat Situngkir. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Bernanda, Gatot Tri Bawono. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Brata.2004. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Jakarta
- Bakhrudin politeknik negeri malang ghozali maskie moh. Khusaini, *peranan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah langsung untuk mendukung kemandirian daerah (studi kasus pemerintah kota malang)*
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No. 01 Februari 2007. BPFU UGM. Yogyakarta

- David Harianto, Priyo Hari Adi. 2006. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Febrian, Riandasa Anugerah, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah (Bd) Pada Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah*, 2011
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan “fiscal stress” (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Hoover, Kevin D. & Steven M. Sheffrin. 1992. Causation, spending, and taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state? *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFEE.
- Joulfaian, D. & R. Mookerjee. 1990. The intertemporal relationship between state and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries. *Public Finance* 45: 109-117.
- Kusnandar, Dodik Siswanto, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Maimunah, Mutiara, *Jurnal SNA: Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*, 2006
- Prakosa, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi empiric di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.
- Ridwan. 2005, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Bina Cipta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

- Siahaan, Marihot, 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Supranto. J. *Statistik , Teori dan Aplikasi*. Edisi Enam. Gramedia. Jakarta
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wibowohadi, Wahyu, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*, Universitas Islam Indonesia, 2011